

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Venezuela merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Amerika Selatan, tepatnya di bagian utara benua Amerika Selatan. Negara ini berbatasan langsung dengan Guyana di sebelah timurnya, berbatasan dengan Kolombia di sebelah baratnya. Sementara, di sebelah selatan berbatasan dengan Brazil dan sebelah utaranya yaitu Laut Karibia. Dalam sistem pemerintahannya, Venezuela menganut sistem pemerintahan Republik Presidensial Federal, dimana kepala negara dan kepala pemerintahannya yaitu seorang Presiden sekaligus dibantu oleh Wakil Presiden Eksekutif. Presiden dan Wakil Presiden ini dipilih langsung melalui pemilihan umum setiap 6 tahun sekali. Ibu kota Venezuela yaitu kota Caracas.

Dari segi perekonomiannya, Venezuela dikenal sebagai negara kaya. Salah satu bukti nyatanya, terlihat negara tersebut dijuluki sebagai negara cadangan penghasil minyak terbesar di dunia yakni memiliki 300 miliar barrel. Adanya, cadangan ini Venezuela mampu melampaui dari negara Arab Saudi. Tidak heran, apabila dulunya negara ini dikenal sebagai negara Makmur. Tercatat sekitar 95% hasil ekspor minyak menjadi pemasukan pendapatan utama Venezuela (BBC Indonesia, 2018).

Sebagai negara yang mempunyai cadangan minyak terbesar ini, Venezuela mempunyai suatu badan yang berwenang dalam melakukan kontrol di perusahaan-perusahaan petroleum Venezuela. Badan ini dikenal sebagai PDVSA. Dalam naungan PDVSA tersebut banyak mendirikan perusahaan minyak domestik dan

asing. Di era kepemimpinan Hugo Chavez, PDVSA banyak menasionalisasikan perusahaan-perusahaan minyak asing. Adapun perusahaan yang terkena dampak dari nasionalisasi Hugo Chavez salah satu perusahaan dari Amerika Serikat yaitu ExxonMobil. ExxonMobil adalah suatu badan perusahaan yang melakukan kegiatan eksplorasi minyak di daratan Orinoco Oil Belt Venezuela. Di tahun 1990an PdVSA dan ExxonMobil melakukan kegiatan proyek Cerro Negro. Proyek ini sebagai kerjasama PdVSA dan ExxonMobil dalam melakukan eksplorasi di Orinoco Oil Belt. Saham yang terdapat di proyek Cerro Negro bernilai sama rata sekitar 41,6% milik ExxonMobil dan 41,6% milik PDVSA, sedangkan sekitar 16,67% sisanya milik Verba Oel (Nida, 2017). Semenjak terdapatnya nasionalisasi terhadap perusahaan minyak asing dilakukan, terjadi sebuah signifikansi pendapatan negara yang berasal dari hasil ekspor minyak Venezuela. Munculnya nasionalisasi tersebut membuat masyarakat Venezuela dapat menikmati hasil kekayaan Venezuela.

Dalam memimpin Venezuela, Hugo Chavez menerapkan ideologi demokratis-sosialis dan Konstitusi Revolusi Bolivarian. Chavez merupakan sosok pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Sebelum kepemimpinan Chavez, pada tahun 1989 Venezuela menganut ideologi neo-liberal di era kepemimpinan Presiden Carlos Andreas Perez. Di masa kepemimpinan yang pertama, Perez memperoleh dukungan oleh masyarakatnya. Namun, di masa kepemimpinan yang kedua Perez banyak melakukan privatisasi industri milik negara dan banyak menghapuskan subsidi bagi masyarakatnya sehingga mendorong rakyatnya untuk melakukan pemberontakan. Pada tahun 1998 Hugo Chavez memenangkan pemilu dan

melakukan perubahan dasar negara Venezuela menjadi Republik Bolivarian. Perubahan dasar negara ini dilandaskan dengan Revolusi Bolivarian yang ia ciptakan. Adanya revolusi ini banyak diterima oleh rakyatnya. Hal ini ditunjukkan dari keberhasilan Hugo Chavez dalam melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan asing dibawah PDVSA dan tidak bergantung terhadap negara adidaya. Dimana revolusi ini, rakyat Venezuela dimanjakan dengan subsidi serta pembangunan besar-besaran kala itu (Agista, 2020).

Selain itu, Hugo Chavez juga menerapkan kebijakan pemerintah sosialis-populis, dimana Chavez mematok barang kebutuhan pokok seperti minyak goreng, tepung hingga peralatan mandi relatif murah. Hal ini bertujuan agar dapat meringankan beban masyarakat miskin. Munculnya kebijakan ini memberikan boomerang karena menyebabkan kebangkrutan banyak pabrik dan perusahaan lainnya. Di Pemilu tahun 2012, Hugo Chavez beserta wakilnya Nicholas Maduro kembali terpilih sebagai presiden. Namun sayangnya, tepat sebelum pelantikannya Hugo Chavez meninggal dunia di tahun 2013. Keberhasilan Hugo Chavez dalam menerapkan Revolusi Bolivarian tersebut nyatanya masih menyisakan nilai-nilai positif terhadap rakyatnya. Pada tahun 2013 Venezuela melakukan pemilihan ulang dan dimenangkan oleh Nicholas Maduro (Sofwan, 2018).

Semenjak meninggalnya Hugo Chavez menyebabkan kondisi ekonomi Venezuela mengalami kritis. Kebijakan Bolivarian yang dibuat oleh Chavez pada hakikatnya merujuk pada pengentasan kemiskinan serta penguatan kedaulatan nasional yang diwujudkan dalam nasionalisasi di sektor perminyakan, program

kesejahteraan serta perlawanan kepada neoliberalisme dan kebijakan luar negeri anti Amerika Serikat (Hartono, 2013).

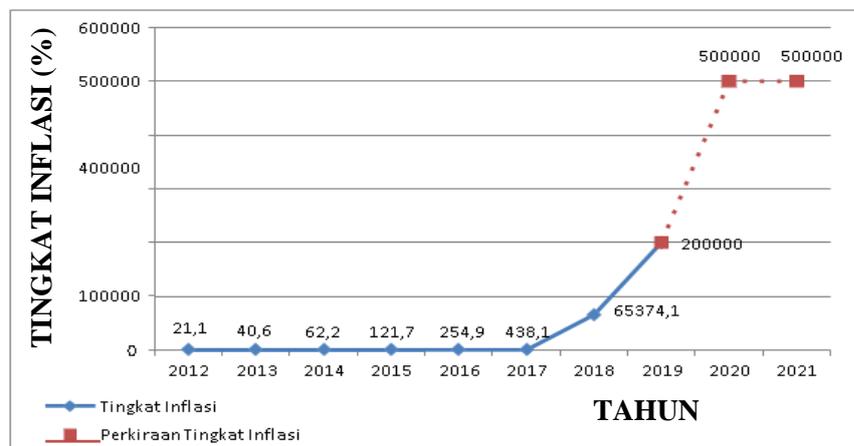
Di era kepemimpinan Nicholas Maduro membuat negara Venezuela semakin hancur dengan ditandai munculnya kasus korupsi, mengalami kegagalan dalam mengurus pemerintah bahkan meningkatnya piutang. Hal inilah membuat Venezuela perekonomiannya semakin ambruk. Dalam memimpin Venezuela, Nicholas Maduro menganut Revolusi Bolivarian melanjutkan paham ideologi dari Chavez. Berdasarkan pengamat liberal menyatakan bahwa kebijakan ekonomi Nicholas Maduro tidak lebih baik daripada sebelumnya (Dallas News, 2017). Pasalnya, salah satu akibat terjadinya krisis ekonomi di Venezuela karena menganut kebijakan populis yang dianut Hugo Chavez. Namun keberhasilan ideologi di masa Hugo Chavez karena didanai dari penghasilan minyak, sedangkan di masa Nicholas Maduro mengalami permasalahan karena awal mula terjadinya penurunan harga minyak dunia ditahun 2014 akibat dari Arab Saudi yang membanjiri pasar minyak dunia untuk menjatuhkan Iran. Sehingga, program populis seperti subsidi kesehatan, pendidikan dan makanan menjadi problem (Novelia, 2020).

Adanya penurunan harga minyak drastis ditahun 2014 membuat Venezuela seketika mengalami penurunan ekonomi yang signifikan, karena tidak mempunyai cadangan pendapatan sektor lainnya. Melihat kondisi tersebut, presiden Nicholas Maduro berupaya untuk mengatasi keadaan ekonominya dengan menerapkan kebijakan deficit spending (pengeluaran lebih besar dari penerimaan pajak) yaitu subsidi besar-besaran serta dalam menangani defisit anggaran yang tiap tahun meningkat membuat Nicholas Maduro mencetak uang secara banyak. Sehingga hal

ini membuat memparah kondisi ekonomi dan menyebabkan melemahnya nilai mata uang Bolivar Venezuela, sehingga mengakibatkan inflasi yang tak terkontrol (Adrianti, 2020).

Gambar 1.1.

Grafik Peningkatan Inflasi Venezuela



Sumber: *World Economic Outlook IMF Data Mapper (2023)*

Berdasarkan gambar grafik tersebut menunjukkan bahwa tingkat inflasi Venezuela dari tahun 2015-2018 mengalami peningkatan yang sangat drastis, sehingga menyebabkan pada tahun 2015 menjadi awal mulainya hiperinflasi di Venezuela. Berdasarkan data *World Economic Outlook IMF Data Mapper* menyatakan Venezuela mengalami tingkat inflasi tertinggi di dunia sepanjang tahun 2015 yakni memperoleh inflasi sekitar 121,7% (World Economic, 2023).

Situasi Venezuela semakin diperburuk dengan munculnya penjatuhan sanksi ekonomi dari Amerika Serikat untuk Venezuela khususnya terhadap sebagian para pejabat Venezuela yang teridentifikasi kasus pencucian uang dan korupsi. Pemberian sanksi juga diberlakukan kepada perusahaan-perusahaan yang ikut andil dalam kasus korupsi negara Venezuela. Adapun bentuk sanksi yang diberikan

Amerika Serikat yakni membekukan aset investasi mereka yang terdapat di Amerika Serikat dan menolak semua bentuk transaksi apapun yang mereka lakukan. Adanya penjatuhan sanksi tersebut bertujuan untuk menghambat pergerakan dari pejabat dan perusahaan dan menahan adanya sumber transaksi yang masuk ke Amerika Serikat. Selain itu, munculnya penjatuhan sanksi ekonomi diduga karena Nicholas Maduro menolak pemberian bantuan kemanusiaan yang disalurkan Amerika Serikat untuk Venezuela berbentuk humanitarian aid yakni menyalurkan bantuan keperluan alat medis, obat-obatan dan makanan. Pemberian bantuan kemanusiaan tersebut akan disalurkan melewati USAID (*United State Agency For International Development*). Adapun alasan Nicholas Maduro menolak bantuan kemanusiaan tersebut karena ia menilai Amerika Serikat telah mengusik kedaulatan dan dinilai telah ikut andil terhadap urusan internal Venezuela.

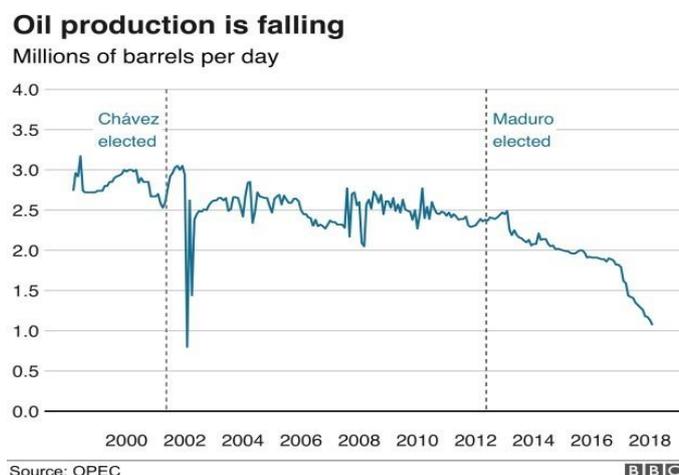
Keadaan perekonomian Venezuela semakin melemah sehingga menyebabkan fase hiperinflasi. Fase hiperinflasi tersebut diakibatkan oleh anjloknya harga minyak bumi sehingga sistem penerimaan negara menjadi terganggu. Sejak harga minyak mengalami penurunan drastis membuat Venezuela mengalami defisit sehingga stabilitas politik domestik tidak stabil karena banyaknya timbul pro-kontra beberapa pihak membuat persoalan penting terkesan terlantar. Akar dari situasi tersebut diduga karena munculnya protes terhadap pihak oposisi kepada Nicholas Maduro karena Nicholas Maduro dianggap gagal dalam mengelola perekonomiannya sehingga masyarakat kesusahan. Keadaan tersebut semakin diperparah oleh oposisi yakni pihak oposisi berupaya untuk melakukan tekanan terhadap pemerintahan Nicholas Maduro dengan melakukan demo dan

mempengaruhi masyarakat untuk semakin menjauhi pemerintahannya. Hal tersebut dilakukan karena kelompok oposisi tidak terima karena Nicholas Maduro telah memenangkan hasil pemilu tersebut yang dengan sahnya menjadi presiden terbaru Venezuela menggantikan Hugo Chavez (Adrianti, 2020).

Kemudian, faktor hiperinflasi lainnya disebabkan karena Venezuela terlalu banyak mencetak uang. Alasannya karena pemerintah mencetak uang tambahan guna meningkatkan upah minimum bagi para pekerja serta pihak pemerintah Venezuela kesulitan dalam memperoleh pinjaman dari negara lain sehingga mengharuskan pemerintah kembali melakukan pencetakan uang tambahan, adanya tindakan tersebut membuat nilai mata uang tersebut semakin menurun. Munculnya penurunan nilai uang memberikan pengaruh terhadap daya beli masyarakat, akibatnya bahan makanan di negara tersebut sukar dijangkau dan harga minyak juga semakin menurun. Berikut ini penulis telah menyajikan gambar penurunan minyak di Venezuela.

Gambar 1.2.

Grafik Penurunan Pasokan Minyak Venezuela



Sumber: BBC NEWS

Berdasarkan gambar grafik tersebut menunjukkan di masa pemerintahan Nicholas Maduro produksi minyak Venezuela mengalami anjlok diakibatkan sistem mengelola buruk dan banyaknya kasus korupsi. Dimana pada tahun 2013 jumlah produksi minyak memperoleh 2,4 juta barel per-hari mengalami penurunan ke angka terendah yaitu 1,43 juta barel per-hari pada 2018 (BBC NEWS, 2018). Selain itu, krisis yang terjadi di masa pemerintahan Nicholas Maduro lantaran karena menganut sistem ekonomi campuran, dimana kebijakan yang akan dilakukan pemerintah Venezuela yakni dengan menetapkan harga kebutuhan pokok relatif murah. Adanya kebijakan tersebut menyebabkan para produsen lebih memilih menjual barangnya ke pasar gelap agar dapat memperoleh keuntungan cukup besar yaitu 15 kali lipat dari harga yang diterapkan pemerintah Venezuela sebelumnya.

Menurut data biro analisis perdagangan global yang mengolah data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan bahwa pengiriman roti ke Venezuela mengalami penurunan sekitar 94% di tahun 2016, kemudian impor daging sapi menurun hingga 63% dari awalnya 350 juta dollar hingga 127 juta dollar di tahun 2016. Tidak hanya itu, kegiatan produksi impor buah-buahan pisang serta stroberi mengalami penurunan mencapai 99% dari sebelumnya mencapai 21 juta dollar hingga menurun sekitar 159.000 dollar. Selain itu, kegiatan impor ikan dan gula juga mengalami penurunan sekitar 87% dan 34% (Kompas.Com, 2016).

Dampak yang paling dirasakan dalam melemahnya ekonomi Venezuela yakni tingkat inflasi semakin meroket di tahun 2017. Dilansir sebuah studi oleh Majelis Nasional yang dikelola oleh pihak oposisi menyatakan bahwa peningkatan inflasi

tiap tahun negaranya telah memperoleh sekitar 1.300.000% dalam kurun waktu 12 bulan sampai November 2018. Kemudian, di akhir tahun saja, harga kebutuhan pokok rata-rata naik dua kali lipat dalam waktu 19 hari. Hal inilah, mengakibatkan banyaknya rakyat Venezuela berjuang untuk membeli barang-barang pokok seperti makanan dan peralatan mandi. (Detik.com, 2019).

Adanya kekacauan di Venezuela ini telah menimbulkan permasalahan-permasalahan lain yang semakin memperburuk situasi internal negaranya. Berdasarkan temuan terbaru, terdapat fakta dimana seseorang yang membeli bahan bakar hanya cukup menukar bahan bakar tersebut dengan rokok ataupun bahan kebutuhan pokok lainnya misalnya beras, minyak goreng, dan gula pasir. Hal ini diakibatkan semakin sulitnya untuk menemukan uang kertas di negara tersebut, dan jika ditemukan pun, uang tersebut sudah tidak bernilai lagi (Liputan6.com, 2019). Kondisi perekonomian yang mulai ambruk sejak 2015 ini akhirnya mulai mengancam kesejahteraan warga negara Venezuela sendiri.

Melihat perekonomian Venezuela mengalami penurunan resesi yang drastis tentu memberikan ancaman besar terhadap negaranya, khususnya di sektor pangan. Dengan kondisi pangan yang semakin merajalela di Venezuela diakibatkan pemerintah tidak mempunyai dana untuk melakukan pengadaan bahan pangan dan pemerintah juga memberikan batasan akses rakyatnya yang cukup terjangkau dalam konsumsi pangan.

Berdasarkan laporan BBC menyatakan bahwa masyarakat negara Venezuela banyak memulung makanan di tempat sampah, hal tersebut dilakukan untuk dapat bertahan hidup (BBC, 2018). Tidak hanya itu, pemerintah mewajibkan warganya

harus bekerja di sektor pertanian demi menangani kelangkaan pangan di negara tersebut. Melihat krisis berkepanjangan di Venezuela tidak kunjung selesai, mengakibatkan sejumlah penduduk banyak memakan daging busuk dan memulung makanan yang berasal dari tempat sampah. Disisi lain, masyarakat negara juga melakukan suatu aksi penjarahan makanan yang berujung pada kekerasan hingga memakan korban jiwa.

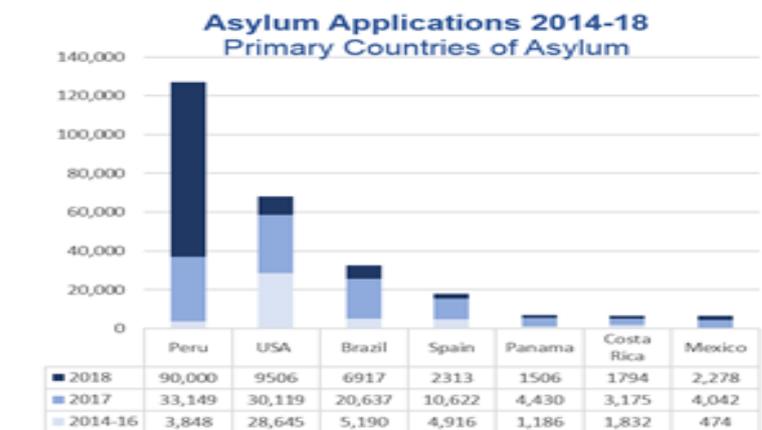
Adanya kondisi perekonomian semakin mengencam, sehingga membuat negara Venezuela kehabisan cadangan bahan pangan. Rumah sakit banyak dipenuhi oleh anak-anak yang sakit. Sementara, dokter tidak memiliki ketersediaan obat dan mesin X-ray dikarenakan pasokan listrik dinegara tersebut padam sejak krisis dimulai. Dilansir data 2017 menyatakan bahwa ada sekitar 6 warga telah meninggal dunia (Kompas.Com, 2018), serta berdasarkan data 2018 dikutip dari AFP menyatakan bahwa ada sekitar 4 orang meninggal dunia dan 15 lainnya mengalami luka-luka akibat melakukan aksi penjarahan makanan tersebut. Tidak hanya itu, ada pula beberapa warganya mencuri hewan di kebun binatang untuk sebagai pasokan pangannya. Mereka terpaksa melakukan aksi tersebut, lantaran banyak masyarakatnya mulai menyerah terhadap masalah inflasi di negaranya yang tidak kunjung selesai (CNN Indonesia, 2018).

Tingginya angka inflasi tersebut, tidak hanya memberikan pengaruh di negara Venezuela saja, melainkan berpengaruh juga di negara tetangga. Pasalnya, di tahun 2018 sesuai dari data PBB menyatakan bahwa sekitar 32,4 juta total populasi warga Venezuela, bahkan lebih dari 2,3 juta atau setara 7% warganya telah mengungsi ke negara tetangga karena dampak dari krisis tersebut (Nainggolan, 2018). Secara

detailnya, berikut ini penulis telah menyajikan gambar data peningkatan pengungsi Venezuela dari tahun 2014-2018.

Gambar 1.3

**Data Peningkatan Jumlah Pengungsi Venezuela Di Amerika Latin
Periode 2014-2018**



Sumber: UNCHR, 2018

Berdasarkan tabel data peningkatan jumlah pengungsi Venezuela yang mengungsi di beberapa negara Amerika Latin diatas yaitu terlihat mayoritas jumlah populasi Venezuela lebih memilih bermigrasi ke negara-negara terdekat. Dilihat dari data tersebut, jumlah pengungsi Venezuela paling tinggi di tahun 2018 yakni Peru memperoleh sekitar 90,00 orang, USA memperoleh sekitar 9,506 orang, Brazil memperoleh sekitar 6,917 orang, Spain memperoleh sekitar 2,313 orang, Mexico memperoleh sekitar 2,278 orang, Costa Rica memperoleh sekitar 1,794 dan terendah di negara Panama dengan mencapai 1,506 orang saja (UNCHR, 2018). Alasan, warganya mengungsi ke negara tetangga karena masalah adminitrasi, tidak terdapat jalur rujukan untuk warga Venezuela karena mereka tidak mempunyai

asuransi, jangkauan jarak, biaya, status migrasi serta adanya pembatasan perjalanan dari pemerintah (Dyah, 2021).

Tidak hanya itu, negara-negara kawasan Amerika Latin akan mengimbau kepada dunia internasional untuk dapat memberikan bantuan kepada jutaan pengungsi Venezuela yang melakukan eksodus ke negara tetangga akibat krisis ekonomi. Dimana beberapa negara Amerika Latin seperti Brazil, Costa Rika, Meksiko, Panama, Peru dan Spain juga akan ikut melaksanakan suatu deklarasi terkait dalam membantu menangani eksodus warga Venezuela serta mengimbau kepada dunia internasional untuk membantu para eksodus penduduk Venezuela, diketahui deklarasi tersebut akan dilaksanakan di ibu kota Ekuador Quito guna mendirikan suatu tim teknis komunitas demi menangani krisis pengungsi Venezuela. Selain itu, mereka juga akan mengimbau dalam hal peningkatan bantuan terhadap warga Venezuela oleh negara-negara Amerika Latin dan dunia internasional. Bahkan, negara Amerika Latin pula akan meminta bantuan kepada badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (BBC, 2018).

Berdasarkan berbagai informasi dan data yang telah penulis jabarkan diatas maka banyaknya warga negara Venezuela yang melakukan eksodus ke negara Amerika Latin menjadi tantangan dan ancaman bagi negara lain yang menjadi tempat eksodus warga negara Venezuela. Bukan hanya negara tetangga saja, dengan banyaknya rakyat Venezuela bereksodus menjadi tantangan juga untuk presiden Nicholas Maduro. Penelitian ini penulis lakukan fokus pada tahun 2015-2018. Adapun alasan memilih tahun 2015-2018 sebagai tahun yang diteliti karena pada tahun tersebut awal mula puncak dari masalah yang terjadi baik dari terjadinya

pergejolakkan transisi situasi politik dan ambruknya kondisi perekonomian Venezuela sehingga terjadinya krisis ekonomi dan menyebabkan fase hiperinflasi dalam kurun waktu 3 tahun belakangan tersebut.

Dalam menganalisa permasalahan penelitian ini penulis menggunakan alat analisa berupa teori yang menjadi dasar dari penganalisaan, yaitu teori *decision-making*. Teori ini berfungsi sebagai instrumen penting yang digunakan penulis dalam menganalisa upaya presiden Nicholas Maduro dalam menyelesaikan masalah krisis ekonomi di negaranya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul penelitian “Upaya Presiden Nicholas Maduro Dalam Mengatasi Hiperinflasi Di Venezuela Tahun 2015-2018”.

Penelitian ini menganalisis upaya Presiden Maduro dalam mengatasi hiperinflasi yang mempertimbangkan dari prespektif ideologi politik Presiden Maduro yang menerapkan kebijakan populisme sayap kiri dan kebijakan sosialis bersifat *deficit spending* (Pengeluaran lebih besar dari penerimaan pajak). Hal inilah yang menjadi menarik untuk peneliti bahas secara mendalam jika dilihat dari ideologinya yang masih menerapkan populisme.

1.2. Identifikasi Masalah

Berikut beberapa poin yang dapat diidentifikasi sebagai permasalahan mengenai “Upaya Presiden Nicholas Maduro Dalam Mengatasi Hiperinflasi Di Venezuela Tahun 2015-2018”:

1. Munculnya transisi sistem kepemimpinan yang terjadi di Venezuela telah memberikan dampak baru dalam stabilitas perekonomian Venezuela.

2. Meroketnya inflasi 2015 sebesar 121,7% menyebabkan masyarakat Venezuela berjuang dalam memenuhi kebutuhan pokok.
3. Munculnya penjatuhan sanksi ekonomi dari Amerika Serikat semakin memperburuk keadaan ekonomi Venezuela

1.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu tentang kepemimpinan presiden Nicholas Maduro dalam mengatasi hiperinflasi di negara Venezuela. Dalam hal ini, tindakan kebijakan yang akan dilakukan presiden Nicholas Maduro sangat mempengaruhi untuk mengatasi permasalahan hiperinflasi yang terjadi dinegaranya. Sebagaimana diketahui, presiden Nicholas Maduro merupakan kepala pemerintahan yang menjadi informan utama yang paling penting dalam mengatur keadaan pemerintahan Venezuela. Keadaan hiperinflasi tersebut telah menghancurkan sistem perekonomian di Venezuela. Sehingga, diperlukan tindakan serta langkah yang tepat yang harus bisa diambil Nicholas Maduro agar permasalahan yang terjadi di negaranya dapat terselesaikan. Adapun batasan dalam penelitian ini adalah dari tahun 2015-2018.

1.4. Rumusan Masalah

Dalam masalah penelitian ini, penulis menetapkan rumusan masalah terkait: Bagaimana upaya presiden Nicholas Maduro dalam mengatasi hiperinflasi di Venezuela dalam kurun waktu 2015-2018?.

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian yang akan penulis buat bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan presiden Nicholas Maduro dalam mengatasi hiperinflasi di Venezuela dalam kurun waktu 2015-2018.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini dapat diperoleh manfaat bagi pihak-pihak terkait. Adapun manfaat penelitian ini jika dilihat dari segi teoritisnya sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perkembangan studi hubungan internasional khususnya dalam permasalahan hiperinflasi yang terjadi di Venezuela.
2. Adanya penelitian ini bertujuan guna memberikan referensi studi kasus dalam studi hubungan internasional terutama di bidang keamanan global yang sesuai dalam mata kuliah HI.
3. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kajian terkait isu krisis yang hingga saat ini mempunyai persoalan yang sangat penting untuk dibahas dalam dinamika hubungan internasional.

1.6.2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini dapat diperoleh manfaat bagi pihak-pihak terkait. Adapun manfaat penelitian ini jika dilihat dari segi praktisnya sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk memperluas bahan referensi penelitian ke depannya baik di kalangan akademis maupun mahasiswa,

sehingga penelitian ke depannya dapat diberikan kemudahan dalam mengakses suatu informasi terkait fenomena krisis ekonomi khususnya Venezuela.

2. Penelitian ini juga dapat dijadikan acuan bagi Indonesia dan negara lainnya dalam menyikapi masalah pangan di negaranya, agar di masa mendatang permasalahan yang dialami negara Venezuela tidak terjadi juga di negara Indonesia dan negara lainnya misalnya negara tersebut dapat membentuk kebijakan khusus dalam mengantisipasi permasalahan ekonomi.